

**GUGUS TUGAS UNTUK MASALAH
IKLIM & SEKTOR KEHUTANAN DI
TINGKAT PARA GUBERNUR**

RENCANA AKSI BERSAMA (2009-2010)
August 2009



Gugus Tugas Untuk Masalah Iklim & Sektor Kehutanan Di Tingkat Para Gubernur



ACEH PROVINCE, INDONESIA



PAPUA PROVINCE, INDONESIA



STATE OF ACRE, BRAZIL



STATE OF AMAPA, BRAZIL



STATE OF AMAZONAS, BRAZIL



STATE OF CALIFORNIA, U.S.



STATE OF ILLINOIS, U.S.



STATE OF MATO GROSSO, BRAZIL



STATE OF PARA, BRAZIL



STATE OF WISCONSIN, U.S.

GORDON AND BETTY
MOORE
FOUNDATION

the David &
Lucile Packard
FOUNDATION

Acknowledgments

Support for the Governors' Climate and Forests Task Force 2009 activities has been generously provided by the Gordon and Betty Moore Foundation and the David and Lucile Packard Foundation.

This report is also available online at www.climatechange.ca.gov/forestry_task_force/

Ringkasan Eksekutif

Pada tanggal 18 November 18 2008, negara-negara bagian California, Illinois, dan Wisconsin di A.S., negara-negara bagian Amapá, Amazonas, Mato Grosso, dan Pará di Brazil, dan provinsi Aceh dan provinsi Papua di Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) di Pertemuan Puncak Perubahan Iklim Para Gubernur di Los Angeles, California. MOU tersebut menjadi landasan bagi kerjasama di masa mendatang dalam sejumlah masalah terkait dengan kebijakan, pembiayaan, pertukaran teknologi, dan penelitian di bidang iklim. Untuk tahun 2009 dan 2010, para pihak telah sepakat untuk memberikan fokus pada ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan, yang secara keseluruhan bertujuan untuk mendorong kerjasama teknis dan pengembangan kapasitas dan mengembangkan rekomendasi-rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan badan-badan pengatur di A.S. dan di tempat-tempat lain yang sedang mempertimbangkan apa dan bagaimana memasukkan penurunan emisi gas rumah kaca (GHG) dari penebangan dan degradasi hutan (REDD) dan penyimpanan yang berasal dari kegiatan-kegiatan karbon hutan lain di tingkat internasional ke dalam sistem kepatuhan GHG mereka yang berkembang.

MOU tersebut secara tegas mensyaratkan Rencana Aksi Bersama untuk memandu upaya-upaya pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Aksi Bersama ini memberikan kerangka kerja dan rekomendasi-rekomendasi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan sepanjang tahun 2009-2010. Rancangan Rencana Aksi Bersama diajukan untuk diterapkan secara resmi oleh negara-negara dan provinsi-provinsi yang merupakan pihak dalam MOU di pertemuan lanjutan pertamanya di Belém, Pará pada tanggal 18-19 Juni 2009. Dalam pertemuan Belém, negara-negara dan provinsi-provinsi yang merupakan pihak dalam MOU membuat sejumlah keputusan penting tentang upaya pelaksanaan MOU yang tercermin di dalam Rencana Aksi Bersama ini. *Gordon and Betty Moore Foundation* dan *David and Lucile Packard Foundation* telah bermurah hati menyediakan pendanaan untuk pertemuan tersebut, serta pertemuan kedua di California pada bulan September 2009 dan kegiatan-kegiatan lanjutan sepanjang tahun 2009.

Kegiatan-kegiatan di sektor kehutanan yang diusulkan di dalam MOU dan Rencana Aksi Bersama ini mewakili upaya-upaya pertama (di setiap tingkat pemerintahan) untuk bergerak ke tahap yang dapat disebut sebagai tahap "pembuktian konsep" dalam upaya berkelanjutan untuk memasukkan REDD ke dalam rejim kepatuhan GHG yang ada dan akan datang. Dengan demikian, upaya pelaksanaan MOU membawa dampak yang bersifat global sebagai tanda bagi badan-badan pemerintah yang lain dan bagi masyarakat kebijakan iklim yang lebih luas bahwa hal tersebut dapat dicapai dan bahwa akan terdapat proses kerjasama transisional yang berarti di antara negara-negara dan provinsi-provinsi yang merupakan pihak dalam MOU untuk mengembangkan kerangka kerja dan mekanisme yang dapat diterapkan untuk menghasilkan aset-aset yang memenuhi tingkat kepatuhan terhadap REDD dan kegiatan-kegiatan karbon hutan lain di Brazil dan Indonesia dan memasukkan aset-aset tersebut ke dalam rejim-rejim kepatuhan yang ada dan akan timbul di Amerika Serikat dan tempat lain.

Rencana Aksi Bersama mengidentifikasi tiga tujuan utama untuk tahun 2009-2010. Tujuan yang pertama adalah untuk membentuk Gugus Kerja untuk Masalah Iklim & Sektor Kehutanan di Tingkat Para Gubernur (GCF) di pertemuan Belém sebagai badan utama yang bertanggung jawab untuk mengembangkan rekomendasi-rekomendasi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan. Sebagaimana disepakati dalam pertemuan Belém, GCF terdiri atas para perwakilan dari masing-masing negara/provinsi yang merupakan pihak dalam MOU, dengan jabatan ketua yang digilir setiap tahun, dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan eksekutif tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan. Tujuan yang kedua dari pertemuan Belém adalah untuk menetapkan proses bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan keikutsertaan pemangku kepentingan lain dalam upaya-upaya pelaksanaan MOU, yang juga dicapai di Belém. Proses ini akan termasuk pertemuan-pertemuan bersama antara GCF dan LSM-LSM/para pemangku kepentingan dan keikutsertaan LSM dalam tiga kelompok kerja yang dibentuk di Belém untuk berfokus pada bidang-bidang substantif yang utama pada ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengembangkan rekomendasi-rekomendasi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan, yang berfokus pada ketiga bidang yang sama tersebut:

- (1) Standar-standar dan kriteria di tingkat proyek untuk kegiatan-kegiatan REDD, yang akan mencakup Laporan Penilaian Protokol yang diharapkan selesai pada tanggal 1 September 2009;
- (2) Kerangka kerja akuntansi dan mekanisme koordinasi untuk karbon hutan; dan integrasi *baseline* dan sasaran-sasaran di tingkat sub-nasional yang telah lama ada dengan kegiatan-kegiatan berbasis proyek; dan
- (3) Penilaian kebutuhan, termasuk kebutuhan teknis, kebutuhan di bidang hukum, kebutuhan kelembagaan, dan kebutuhan keuangan di negara-negara dan provinsi-provinsi yang merupakan pihak dalam MOU untuk menuju kegiatan-kegiatan yang memenuhi tingkat kepatuhan terhadap REDD.

Rencana Aksi Bersama memberikan rincian tentang masalah-masalah utama yang perlu ditangani di ketiga bidang tersebut oleh GCF dan para peserta kelompok kerja yang lain. Kelompok-kelompok kerja tersebut akan melaporkan kembali kepada seluruh anggota GCF di pertemuan berikutnya di California pada bulan September 2009 dan secara teratur setelahnya.

Untuk tahun 2010, GCF akan melanjutkan kerjanya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan, dengan memberikan perhatian utama pada upaya-upaya legislatif dan pembuatan undang-undang yang penting dalam rejim-rejim kepatuhan terhadap GHG yang akan datang di Amerika Serikat. Sambil menunggu dukungan keuangan tambahan, GCF bermaksud untuk mengadakan dua pertemuan lanjutan pada tahun 2010. Rencana Aksi Bersama tersebut dimaksudkan sebagai "dokumen hidup" dan akan direvisi dan disempurnakan sebagaimana diperlukan guna memandu kegiatan-kegiatan pelaksanaan di sektor kehutanan di masa mendatang oleh negara-negara/provinsi-provinsi yang merupakan pihak dalam MOU.

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan & Tujuan-Tujuan Utama	1
II. Latar Belakang Ketentuan-Ketentuan MOU di Sektor Kehutanan & Debat Kebijakan REDD Saat Ini	7
A. Latar Belakang Ketentuan-Ketentuan MOU di Sektor Kehutanan	7
B. Pelajaran Terkait dari Debat Kebijakan REDD Saat Ini	7
III. Pembentukan Gugus Tugas untuk Masalah Iklim & Sektor Kehutanan di Tingkat Para Gubernur	9
A. Susunan & Tata Pemerintahan GCF	9
B. Tanggung Jawab GCF	11
C. Dukungan GCF	12
IV. Memfasilitasi Keikutsertaan LSM & Pemangku Kepentingan	13
V. Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan MOU di Sektor Kehutanan (2009-2010)	14
A. Standar-standar & Kriteria di Tingkat Proyek	16
B. Kerangka Kerja Akuntansi & Mekanisme Koordinasi	18
C. Penilaian Kebutuhan	21
VI. Kesimpulan	21
VII. Lampiran (dokumen yang terpisah)	
Lampiran 1	Nota Kesepahaman
Lampiran 2	Kegiatan-Kegiatan Utama dan Kebutuhan Negara-Negara dan Provinsi-Provinsi GCF
Lampiran 3	Kegiatan-Kegiatan Utama dari Badan-Badan Nasional
Lampiran 4	Standar-Standar dan Kriteria di tingkat Proyek
Lampiran 5	Model Kerangka Kerja untuk Koordinasi REDD
Lampiran 6	Jadwal untuk Kegiatan-Kegiatan di tahun 2009-2010

I. Pendahuluan & Tujuan-Tujuan Utama

Rencana Aksi Bersama ini memberikan landasan bagi pelaksanaan ketentuan-ketentuan di sektor kehutanan pada Nota Kesepahaman (MOU) bulan November 2008¹ yang ditandatangani antara sembilan negara dan provinsi di A.S., Indonesia, dan Brazil tentang sejumlah kegiatan terkait dengan perubahan iklim. Rencana Aksi Bersama secara garis besar memaparkan kegiatan-kegiatan pelaksanaan organisasi, prosedural, dan substantif yang utama untuk tahun 2009-2010, dengan tujuan akhir untuk mengembangkan rekomendasi-rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan badan-badan pengatur di A.S. dan di tempat-tempat lain yang mempertimbangkan apa dan bagaimana memasukkan kompensasi karbon yang memenuhi tingkat kepatuhan yang bersifat nyata, dapat diverifikasi dan permanen dari penurunan emisi gas rumah kaca (GHG) dari penebangan hutan dan degradasi hutan (REDD) dan kegiatan-kegiatan di sektor kehutanan lain² ke dalam sistem kepatuhan gas rumah kaca (GHG) mereka.³

Penebangan hutan baru-baru ini telah muncul sebagai fokus utama dalam kebijakan terkait dengan perubahan iklim di berbagai tingkat pemerintahan. Dengan makin banyaknya bukti bahwa konsentrasi CO₂ di atmosfer tidak dapat distabilkan di tingkat yang aman tanpa penanganan terhadap emisi dari sektor kehutanan, yang saat ini menyumbang sekitar 20% emisi GHG antropogenik dunia, para pembuat kebijakan secara aktif mengupayakan cara-cara untuk mengintegrasikan sektor kehutanan ke dalam rejim kepatuhan terhadap GHG yang ada dan yang berkembang. Sebagai contoh sejak tahun 2005, telah terdapat upaya bersama dalam proses Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)) untuk mengintegrasikan REDD ke dalam traktat iklim pasca tahun 2012, yang mencerminkan titik tolak yang signifikan dari aturan-aturan Protokol Kyoto yang ada saat ini, yang secara tegas mengecualikan pencegahan penebangan hutan dari kredit berdasarkan Mekanisme Pembangunan yang Bersih (CDM).⁴

Negara-negara hutan tropis terkemuka seperti Brazil dan Indonesia telah ikut serta dengan sangat aktif dalam pembahasan-pembahasan internasional tentang kebijakan-kebijakan dan insentif-insentif yang sesuai yang diperlukan untuk memasukkan penebangan hutan dan kegiatan-kegiatan di sektor kehutanan ke dalam kebijakan di sektor kehutanan dengan cara yang bermakna. Walaupun banyak masalah penting yang tetap tidak terselesaikan, nampaknya sangat mungkin bahwa perjanjian iklim internasional pasca tahun 2012 akan mencakup ketentuan-ketentuan yang kuat tentang REDD.

Di saat yang sama, Brazil dan Indonesia, bersama dengan negara-negara dan provinsi-provinsi yang merupakan pihak dalam MOU, bergerak maju dengan upaya-upaya di berbagai tingkat untuk mengurangi emisi dari penebangan hutan dan untuk menjadikan REDD sebagai komponen utama dalam upaya-upaya penanggulangan masalah iklim mereka sendiri (lihat Lampiran 2 untuk uraian kegiatan-kegiatan terkait REDD yang utama di Brazil, Indonesia, negara-negara dan

1 Naskah lengkap dari MOU tersedia di Lampiran 1.

2 Ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan termasuk REDD serta kegiatan-kegiatan penyimpanan hutan lain seperti penanaman kembali, penghijauan, dan pengelolaan hutan yang lestari. Sejumlah usulan perundang-undangan federal di Amerika Serikat juga mencakup kesesuaian kegiatan-kegiatan karbon hutan secara menyeluruh. Selain itu, pembahasan terkini yang terjadi di dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)) telah memperluas konsep REDD sehingga mencakup kegiatan-kegiatan lain seperti pelestarian dan pemulihan hutan, pengelolaan hutan yang lestari, dan penghijauan (terkadang disebut sebagai REDD+). Walaupun Rencana Aksi Bersama ini utamanya berfokus pada kegiatan-kegiatan REDD, negara-negara yang merupakan pihak di dalam MOU tidak berkeinginan untuk mengecualikan kegiatan-kegiatan karbon hutan terkait yang lain.

3 Lihat MOU di Lampiran 1, Pasal 4 (dengan ketentuan bahwa Rencana Aksi Bersama akan memuat "semua ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama yang disepakati, termasuk ruang lingkupnya, koordinasi dan penyelenggaraan, alokasi sumber daya, pertukaran ahli dan profesional, masalah-masalah administratifnya, dan setiap informasi lain yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan Nota Kesepahaman ini" dan "untuk menindaklanjuti dan melaksanakan rencana-rencana kerja, kelompok-kelompok dengan tema khusus. Kelompok-kelompok tersebut akan dipimpin oleh para pejabat dari Para Pihak dan akan mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.")

4 Rencana yang disebut Rencana Aksi Bali, yang diajukan oleh Para Pihak dalam UNFCCC pada COP 13 di Bali Indonesia pada tahun 2007 sebagai "peta jalan" untuk negosiasi pasca tahun 2012, secara tegas mengarahkan bahwa REDD dimasukkan ke dalam negosiasi. Lihat *Rencana Aksi Bali*, Keputusan ___/CP.13. Yang terbaru adalah rancangan naskah negosiasi untuk perjanjian pasca tahun 2012, yang dipublikasikan pada tanggal 19 Mei 2009 yang memuat sejumlah opsi agar memasukkan REDD dalam perjanjian.

provinsi-provinsi yang merupakan pihak dalam MOU). Memang, sejumlah kegiatan REDD yang paling penting yang saat ini dipersiapkan sedang dilakukan di negara-negara bagian dan provinsi-provinsi di Brazil dan Indonesia.

Di Amerika Serikat, dimasukkannya kegiatan REDD dan kegiatan karbon hutan internasional lain juga mengalami penolakan dalam debat tentang desain rejim kepatuhan terhadap GHG di tingkat nasional dan daerah. Usulan perundang-undangan utama untuk sistem batas dan tukar yang diperkenalkan di Kongres A.S. selama beberapa tahun terakhir telah mencakup ketentuan-ketentuan yang kuat untuk karbon hutan internasional. Yang terbaru, Undang-Undang Energi Bersih & Jaminan Amerika Tahun 2009 (*American Clean Energy & Security Act of 2009* (H.R. 2454)), yang diajukan oleh Komite Energi & Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 21 Mei 2009 dan diharapkan akan dibawa ke pemungutan suara di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat secara keseluruhan pada musim panas ini, memuat ketentuan-ketentuan yang menyeluruh untuk kegiatan-kegiatan REDD, termasuk penyisihan 5% dari jumlah tunjangan emisi A.S. hingga tahun 2025 untuk pengembangan kapasitas dan penurunan tambahan serta ketentuan-ketentuan kompensasi internasional untuk penurunan penebangan hutan hingga mencapai 1 milyar ton per tahun.⁵

Tentunya, sejumlah negara bagian di A.S. dan kelompok negara secara aktif mempertimbangkan cara-cara untuk memasukkan kegiatan REDD dan kegiatan karbon hutan lainnya ke dalam rezim kepatuhan terhadap GHG-nya sendiri (lihat Lampiran 2 untuk uraian tentang kegiatan-kegiatan terkait dengan REDD di tingkat negara bagian dan tingkat negara federal di Amerika Serikat). California utamanya, telah mengesahkan perundang-undangan perubahan iklimnya sendiri dan saat ini berada dalam posisi penyesuaian peraturan dengan aturan-aturan yang disyaratkan pada akhir tahun 2010.⁶ Aturan-aturan tersebut, yang dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang mengakui kompensasi internasional dari kegiatan REDD dan kegiatan di sektor kehutanan lain, tampaknya akan berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan aturan-aturan Federal untuk sistem kepatuhan terhadap GHG yang berkembang.

Rencana Aksi Bersama ini didasari oleh pengamatan bahwa rezim-rezim yang berkembang di A.S. (dan mungkin di negara-negara lain) kemungkinan besar tidak akan menerima kredit-kredit kompensasi dari proyek-proyek REDD di Brazil atau Indonesia yang berdiri sendiri. Alih-alih, kegiatan-kegiatan REDD di negara-negara tersebut (dan secara luas di negara-negara dan provinsi-provinsi di Brazil dan Indonesia yang merupakan pihak di dalam MOU dan mungkin yurisdiksi-yurisdiksi lain) kemungkinan harus dimasukkan ke dalam kerangka kerja akuntansi di tingkat negara, regional maupun nasional.

Mengingat bahwa negara-negara dan provinsi-provinsi yang merupakan pihak dalam MOU secara bersama-sama terdiri atas sekitar 50% hutan tropis dunia, upaya-upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan menciptakan peluang yang signifikan untuk memajukan pembahasan kebijakan saat ini tentang REDD. Negara-negara dan provinsi-provinsi yang merupakan pihak dalam MOU mengakui bahwa kebijakan tentang REDD sedang dibuat di berbagai tingkat pemerintahan dan oleh karena itu, berkomitmen untuk melanjutkan hal tersebut dengan cara yang sesuai dengan upaya-upaya tersebut. Terkait dengan hal tersebut, negara-negara dan provinsi-provinsi yang merupakan pihak dalam MOU memandang upaya pelaksanaan MOU sebagai peluang untuk memberikan informasi tentang desain rezim-rezim kepatuhan terhadap GHG yang bermunculan yang mempertimbangkan untuk memasukkan kegiatan-kegiatan REDD. Dari sudut pandang tersebut, proses MOU mewakili upaya pertama (di setiap tingkat pemerintahan) untuk bergerak ke tahap yang dapat disebut tahap “pembuktian konsep” dalam upaya yang berkelanjutan untuk memasukkan REDD ke dalam rezim kepatuhan terhadap GHG yang ada dan yang berkembang. Dengan demikian, upaya pelaksanaan MOU membawa dampak yang bersifat global sebagai tanda bagi badan-badan pemerintah yang lain dan bagi masyarakat kebijakan iklim yang lebih luas bahwa hal tersebut dapat dicapai dan bahwa akan terdapat proses kerjasama transisional

⁵ Usulan tentang penyisihan tunjangan emisi untuk REDD turun hingga 3% dari jumlah tunjangan untuk A.S. dari tahun 2026-2030 dan hingga 2% dari tahun 2031 hingga 2050.

⁶ Rencana penetapan ruang lingkup yang baru saja dipublikasikan dari Badan Sumber Daya Udara California (*California Air Resources Board* (CARB)), yang memberikan kerangka kerja bagi pengembangan peraturan pelaksanaan untuk rejim kepatuhan terhadap GHG California sendiri, mengakui pentingnya kegiatan REDD dan kegiatan karbon hutan internasional lain. Lihat ARB, Usulan Rencana penetapan ruang lingkup Perubahan Iklim: Kerangka Kerja untuk Perubahan (Oktober 2008; disetujui bulan Desember 2008), tersedia di <http://www.arb.ca.gov/cc/scopingplan/document/psp.pdf>, pada hal. 38, 115.

yang berarti di antara negara-negara dan provinsi-provinsi yang merupakan pihak dalam MOU untuk mengembangkan kerangka kerja dan mekanisme yang dapat diterapkan untuk menghasilkan aset-aset yang memenuhi tingkat kepatuhan terhadap REDD dan kegiatan-kegiatan karbon hutan lain di Brazil dan Indonesia dan memasukkan aset-aset tersebut ke dalam rezim-rezim kepatuhan yang ada dan yang berkembang di Amerika Serikat dan tempat lain.

Sebagaimana dijelaskan secara ringkas dalam *Tabel 1* dan dirinci dalam Lampiran 2, masing-masing negara atau provinsi yang merupakan pihak dalam MOU telah bergerak maju dengan berbagai kegiatan terkait dengan iklim dan REDD, dengan sejumlah proyek REDD yang penting yang telah dilaksanakan di Brazil dan Indonesia. Dengan demikian, proses MOU memberikan peluang yang penting untuk menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan tersebut ke dalam suatu upaya untuk mempengaruhi perkembangan aturan-aturan dan lembaga-lembaga pendukung untuk kegiatan-kegiatan yang memenuhi tingkat kepatuhan terhadap REDD. Rencana Aksi Bersama tersebut memberikan peta jalan untuk upaya-upaya tersebut hingga akhir tahun 2010.

Tabel 1. Kegiatan-Kegiatan Utama GHG dan di Sektor Kehutanan di Negara-Negara GCF

NEGARA/ PROVINSI	BATAS EMISI GHG	EMISI GHG & DAFTAR INVENTARIS PENYIMPANAN	BASELINE DAN/ ATAU SASARAN DI SEKTOR KEHUTANAN	DAFTAR UNTUK KEGIATAN- KEGIATAN DI SEKTOR KEHUTANAN	PROYEK- PROYEK KARBON HUTAN YANG SEDANG BERLANGSUNG	SOROTAN LAIN
BRAZIL						
Acre		Rencana untuk dikembangkan hingga mencakup sektor energi, transportasi, dan industri Daftar inventaris perubahan Kegunaan Hutan dan Lahan	Rencana REDD (dalam proses; diharapkan pada bulan Juli 2009) Rencana untuk Pencegahan dan Pengendalian Penebangan Hutan (dalam proses; diharapkan pada bulan Juli 2009) Sistem pemantauan degradasi dan penebangan hutan	Rencana REDD (dalam proses)	Proses penghijauan	--Pembagian Zona Ekonomi Ekologi --Kebijakan untuk Penilaian Aset Hutan --Undang-Undang Chico Mendes tentang pembayaran jasa konservasi untuk para penyadap karet --Sertifikasi Properti yang Lestari dan Bonus tahunan --Meningkatnya produktifitas di daerah-daerah penebangan hutan --Berbagai Rencana Pengelolaan Wilayah Asli
Amapa		Daftar Inventaris Hutan Produksi Negara sedang dibuat	Rencana untuk Pencegahan dan Pengendalian Penebangan Hutan (dalam proses)	Penentuan stok karbon di Hutan Produksi Negara		--Ditetapkannya Hutan Produksi Negara Bagian Amapá --Kebijakan Lingkungan Hidup Negara Bagian Tahun 2009 --undang-undang lingkungan hidup dan kehutanan lain (dalam pengembangan)

Tabel 1. Kegiatan-Kegiatan Utama GHG dan di Sektor Kehutanan di Negara-Negara GCF

NEGARA/ PROVINSI	BATAS EMISI GHG	EMISI GHG & DAFTAR INVENTARIS PENYIMPANAN	BASELINE DAN/ ATAU SASARAN DI SEKTOR KEHUTANAN	DAFTAR UNTUK KEGIATAN- KEGIATAN DI SEKTOR KEHUTANAN	PROYEK- PROYEK KARBON HUTAN YANG SEDANG BERLANGSUNG	SOROTAN LAIN
BRAZIL						
Amazonas		Program Negara Bagian untuk Pemantauan Persediaan Karbon Hutan dan Keanekaragaman Hayati	Undang-Undang Negara Bagian No. 3135 memuat strategi REDD Diselesaikannya Rencana Negara untuk Pencegahan dan Pengendalian Penebangan Hutan		--Juma --Apui --Batas Negara Tiga Lapis --Netralisasi Karbon untuk Piala Dunia FIFA Tahun 2014	--Undang-Undang Negara Bagian No. 3135, Kebijakan Negara Bagian untuk Perubahan Iklim (PEMC-AM) --Programa Bolsa Floresta tentang Satuan Konservasi Negara Bagian (UCE) --Pusat Perubahan Iklim Negara Bagian (CECLIMA) --Kebijakan Negara Bagian untuk Layanan Lingkungan Hidup dan Konservasi Hutan (dalam pengembangan) -- Forum Amazona tentang Perubahan Iklim, Layanan Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan
Mato Grosso		Sejumlah percontohan hutan dilakukan untuk CCSX			CCSX (46 proyek yang mencakup 602.711 ha) Proyek REDD di daerah NW di Mato Grosso dengan ICV dan TNC (sedang dalam proses)	-- UU No. 911 untuk pembentukan Forum tentang Perubahan Iklim -- UU No. 327, 343 untuk pembentukan Peraturan Lingkungan Hidup di Pedesaan dan Program-Program Perizinan --Rencana Perubahan Iklim Negara Bagian (sedang dalam proses) --Undang-Undang tentang Program Pengelolaan Hutan -- Rencana untuk Mencegah Penebangan Hutan dan Pertanian dengan Ladang Bepindah (dalam pengembangan) -- Pembentukan Zona Sosioekonomi dan Ekologi (dalam tahap akhir kajian)

Tabel 1. Kegiatan-Kegiatan Utama GHG dan di Sektor Kehutanan di Negara-Negara GCF

NEGARA/ PROVINSI	BATAS EMISI GHG	EMISI GHG & DAFTAR INVENTARIS PENYIMPANAN	BASELINE DAN/ ATAU SASARAN DI SEKTOR KEHUTANAN	DAFTAR UNTUK KEGIATAN- KEGIATAN DI SEKTOR KEHUTANAN	PROYEK- PROYEK KARBON HUTAN YANG SEDANG BERLANGSUNG	SOROTAN LAIN
BRAZIL						
Pará			Rencana Pencegahan, prakarsa-prakarsa Aksi dan Alternatif-Alternatif untuk Penebangan Hutan di Negara Para-PPCAD-PA, disetujui oleh Surat Keputusan Negara No. 1697, tanggal 8 Juni 2009		-- Proyek Satu Milyar Pohon untuk Amazon -- Proyek Percontohan REDD di Sao Felix do Xingu (Konservasi Alam-TNC, dengan kemitraan bersama SEMA-PA) -- Proyek Karbon Sosial Lingkungan di Xingu (TNC, dengan kemitraan bersama SEMA-PA); -- Proyek Calha Notre (Konservasi Internasional-CI), dengan kemitraan bersama SEMA-PA)	-- Surat Keputusan Negara No. 1764, tertanggal 25 Juni 2009, mendirikan Kelompok Kerja Eksekutif untuk pembentukan Forum Perubahan Iklim Para (Fórum Paraense de Mudanças Climáticas) -- Pendaftaran online untuk Lingkungan Pedesaan (Cadastro Ambiental Rural – CAR) yang bertujuan untuk melakukan standarisasi terhadap kegiatan-kegiatan lingkungan dan menentukan daerah-daerah yang merupakan daerah cadangan yang sah dan daerah perlindungan permanent -- Pembentukan zona Makro Ekologi Ekonomi di Negara Para (UU No. 6.745, tertanggal 6 Mei 2005)
INDONESIA						
Aceh	Aceh - Indonesia – Industri Kendaraan Bermotor	PDD (Dokumen Desain Proyek) Ulu Masen membuat perkiraan tentang emisi hutan Audit CCBA (Aliansi Iklim, Masyarakat & Keanekaragaman Hayati) menyatakan adanya potensi sebesar 100 juta ton yang tersedia untuk kredit karbon selama 30 tahun, angka yang saat ini sedang divalidasi/ diverifikasi	Baseline sektor kehutanan – Tim Rancang Ulang Aceh digunakan sebagai baseline untuk Rencana Tata Ruang Hutan Aceh	Peraturan Departemen Kehutanan No. 30 / Menhut-II / 2009	--Proyek REDD Ekosistem Ulu Masen --Proyek REDD Ekosistem Leuser	
Papua	Penilaian stok karbon yang direncanakan di lokasi-lokasi percontohan REDD (2008-2009)			Jayapura (penggalan FFI/Mac): Mimika/ Mamberamo (Hutan Baru) & Merauke - Proyek Percontohan REDD Jayapura & Merauke-Mappi-Asmat	-- Peraturan Menteri Kehutanan No. 30/Menhut-II/2009 -- Peraturan Otonomi Khusus Papua tentang Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2009,	Penilaian stok karbon yang direncanakan di lokasi-lokasi percontohan REDD (2008-2009)

Tabel 1. Kegiatan-Kegiatan Utama GHG dan di Sektor Kehutanan di Negara-Negara GCF

NEGARA/ PROVINSI	BATAS EMISI GHG	EMISI GHG & DAFTAR INVENTARIS PENYIMPANAN	BASELINE DAN/ ATAU SASARAN DI SEKTOR KEHUTANAN	DAFTAR UNTUK KEGIATAN- KEGIATAN DI SEKTOR KEHUTANAN	PROYEK- PROYEK KARBON HUTAN YANG SEDANG BERLANGSUNG	SOROTAN LAIN
AMERIKA SERIKAT						
California	Batas GHG di bidang ekonomi AB 32; Prakarsa Iklim Barat (sedang dalam proses)	Daftar inventaris GHG Dewan Sumber Daya Udara Air sebagian berdasarkan data dari Analisis Inventaris Kehutanan Layanan Kehutanan A.S.	sasaran emisi hutan untuk sektor kehutanan California tahun 2020	Daftar Tindakan Iklim memiliki basis data untuk proyek-proyek di California	Delapan proyek kehutanan yang terdaftar sebagai bagian dari Daftar Cadangan Tindakan Iklim	- Protokol di sektor kehutanan yang disahkan oleh pemerintah negara bagian California pada tahun 2009 - protokol di sektor kehutanan yang baru diperkirakan akan dikembangkan pada bulan September 2009
Illinois	Persetujuan GHG di Midwest (MWGGA) (dalam proses)	Pencitraan jarak jauh berkala terhadap cakupan lahan di seluruh negara bagian, termasuk cakupan hutan; klasifikasi masyarakat dan lahan kayu dan kehutanan yang dimutakhirkan; updated; pengembangan kemampuan pemetaan LIDAR	<i>Baseline</i> kemungkinan tersedia dari Layanan Kehutanan USDA, Stasiun Penelitian Bagian Utara	Sebagai keluaran dalam proses MWGGA (dalam proses)		--Rencana Tindakan Iklim --Prakarsa Konservasi dan Iklim Illinois --Program Pemulihan & Pengelolaan Habitat --Identifikasi Wilayah-Wilayah Peluang Konservasi (COA) di dalam Rencana Suaka Alam yang Komprehensif di seluruh Negara Bagian; Prakarsa tentang Lahan-Lahan Vital mendukung LSM-LSM yang bekerja di COA
AMERIKA SERIKAT						
Wisconsin	MWGGA (dalam proses); sasaran emisi Gugus Tugas Pemanasan Global Gubernur Doyle (perundang-undangan sedang dalam rancangan)	Emisi udara dilaporkan setiap tahun	<i>Baseline</i> dan perubahan di sektor kehutanan di tahun 1992-2001 diselesaikan oleh Winrock International	Sebagai keluaran dalam proses MWGGA (dalam proses)		-- Gugus Tugas & Strategi Pemanasan Global Gubernur Doyle --Program Bio Massa Hutan

Sebagaimana dirinci di bawah, Rencana Aksi Bersama ini mengidentifikasi tiga tujuan utama untuk tahun 2009-2010:

- (1) Membentuk Gugus Tugas untuk Masalah Iklim dan di Sektor Kehutanan di Tingkat Gubernur sebagai badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan;
- (2) Menetapkan proses bagi LSM dan keikutsertaan pemangku kepentingan dalam upaya-upaya pelaksanaan MOU; dan
- (3) Memprakarsai pelaksanaan substantif dari ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan.

Tujuan-tujuan tersebut dan pokok-pokok aksi yang diambil di pertemuan Belém dibahas di bagian II-IV di bawah ini. Bagian berikutnya memberikan latar belakang singkat tentang ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan dan pelajaran-pelajaran utama dari pembahasan kebijakan REDD yang ada saat ini yang relevan dengan upaya pelaksanaan MOU.

II. Latar Belakang Ketentuan-Ketentuan MOU di Sektor Kehutanan & Debat Kebijakan REDD Saat Ini

A. Latar Belakang Ketentuan-Ketentuan MOU di Sektor Kehutanan

Pada tanggal 18 November 2008, negara bagian California, Wisconsin, dan Illinois di A.S., negara bagian Amazonas, Amapá, Mato Grosso, dan Pará di Brazil, dan provinsi Aceh dan Papua di Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) pada Pertemuan Puncak Perubahan Iklim Para Gubernur di Los Angeles, California.⁷ Walaupun MOU memberikan landasan untuk kerjasama di masa mendatang dalam sejumlah masalah yang terkait dengan kebijakan, pembiayaan, pertukaran teknologi, dan penelitian di bidang iklim, para pihak sepakat untuk memusatkan upaya-upayanya di tahun 2009 dan 2010 pada sektor kehutanan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(a) MOU, para pihak berkeinginan untuk bekerjasama dalam sejumlah rangkaian kegiatan di sektor kehutanan, termasuk “Menurunkan emisi gas rumah kaca dari penebangan hutan dan degradasi lahan — yang dengan cara lain dikenal sebagai ‘REDD’ — dan penyimpanan karbon tambahan melalui pemulihan dan penghijauan kembali lahan dan hutan yang telah mengalami degradasi, dan melalui peningkatan praktik-praktik pengelolaan hutan.”

Kegiatan-kegiatan pelaksanaan MOU untuk 2009-2010 akan utamanya berfokus pada pelaksanaan Pasal 2(b) MOU. Pasal 2(b) menetapkan keseluruhan tujuan untuk mengambil langkah konkrit menuju pengembangan aturan-aturan dalam sektor kehutanan yang memastikan bahwa penurunan emisi dan penyimpanan dari kegiatan-kegiatan di tingkat daerah di Brazil dan Indonesia (1) bersifat nyata, dapat diukur, dapat diverifikasi, dan tetap; dan (2) mampu diakui dalam mekanisme kepatuhan oleh program di tingkat negara, provinsi, regional, nasional atau internasional yang dimiliki oleh masing-masing pihak.⁸

Negara Bagian California telah menjamin pendanaan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan MOU tahun 2009 dari *Gordon and Betty Moore Foundation* dan *David and Lucile Packard Foundation*. Hibah tersebut dikoordinasikan dengan para anggota GCF dan dikelola oleh Universitas Colorado untuk mendukung pengembangan keluaran yang diuraikan di bawah ini serta pengeluaran untuk biaya perjalanan dan pertemuan untuk pertemuan negara-negara dan provinsi-provinsi yang merupakan pihak dalam MOU pada bulan Juni 2009 (Belém, Brazil) dan September 2009 (Los Angeles, California).

B. Pelajaran Terkait dari Debat Kebijakan REDD Saat Ini

Walaupun masih terlalu dini untuk memperkirakan cara yang tepat untuk memasukkan REDD ke dalam kebijakan tentang iklim internasional dan rejim kepatuhan yang berkembang di A.S., sejumlah pengamatan patut dipertimbangkan seiring dengan perkembangan proses pelaksanaan.

Pertama-tama, walaupun terdapat debat yang berkelanjutan di dalam pembahasan UNFCCC tentang mekanisme(-mekanisme) kebijakan yang tepat untuk REDD, dengan sejumlah negara yang lebih memilih pendekatan berbasis dana dan negara-negara lain mengusung pembiayaan berbasis pasar melalui ketentuan-ketentuan yang akan mengakui kredit REDD dalam pasar-pasar kepatuhan,⁹ sangat mungkin bahwa rezim kepatuhan terhadap GHG yang berkembang di

7 Lihat MOU di Lampiran 1; para penandatangan MOU adalah Gubernur Antônio Waldez Góes da Silva (Amapá, Brazil), Gubernur Eduardo Braga (Amazonas, Brazil), Gubernur Blario Maggi (Mato Grosso, Brazil), Gubernur Ana Júlia de Vasconcelos Carepa (Pará, Brazil), Gubernur Irwandi Yusuf (Aceh, Indonesia), Gubernur Barnabas Suebu (Papua, Indonesia), Gubernur Jim Doyle (Wisconsin, U.S.), dan Gubernur Rod Blagojevich (Illinois, U.S.), yang digantikan oleh Pat Quinn. Di pertemuan Belem, negara bagian Acre di Brazil disahkan sebagai anggota pendiri GCF ke-10.

8 Lihat MOU di Lampiran 1, Pasal 2(b).

9 Sejumlah pendanaan bilateral dan multilateral tersedia untuk pengembangan kapasitas REDD di tingkat internasional, dengan tujuan untuk menyiapkan negara-negara agar dapat ikut serta dalam pasar kepatuhan. Kemudian, dalam usulan peraturan perundang-undangan A.S. tentang iklim, terdapat ketentuan-ketentuan yang akan mengalokasikan sebagian tunjangan emisi A.S. (atau pendapatan penawaran untuk penjualan tunjangan tersebut) untuk upaya-upaya pengembangan kapasitas serta ketentuan-ketentuan yang kuat untuk kompensasi dari kegiatan-kegiatan REDD.

Amerika Serikat (di negara bagian dan negara federal) akan memasukkan ketentuan-ketentuan yang mengakui kompensasi kredit dari kegiatan-kegiatan REDD tertentu. Sebagaimana dengan ketentuan-ketentuan kompensasi lainnya, setiap kredit tersebut akan diputuskan secara *ex post*, setelah ditunjukkannya kinerja. Dengan demikian, proses MOU akan berfokus pada pengembangan aturan-aturan untuk kredit yang mematuhi tingkat kepatuhan terhadap REDD.

Kedua, kontras dengan akunting murni di tingkat proyek, nampaknya terdapat preferensi yang kuat di dalam pembahasan REDD yang terjadi saat ini untuk akunting yang mencakup yurisdiksi (di tingkat nasional dan/atau daerah) berkaitan dengan *baseline* sejarah atau skenario acuan emisi yang lain. Sebagai contoh, sebagian besar pembahasan REDD dalam konteks UNFCCC, telah berfokus pada akunting di tingkat nasional. Semua ketentuan REDD dalam usulan perundang-undangan di A.S. hingga saat ini telah didasarkan pada akunting di tingkat nasional atau tingkat negara bagian/provinsi, dengan terbatasnya peluang bagi kegiatan-kegiatan di tingkat proyek yang mandiri. Demikian halnya, Rencana Ruang Lingkup Badan Sumber Daya Udara Californi (ARB), yang memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan perundang-undangan tentang perubahan iklim Californi,¹⁰ secara khusus mengidentifikasi kemungkinan untuk menerima kompensasi dari “yurisdiksi yang menunjukkan kinerja. . . dalam mengurangi emisi atau meningkatkan penyimpanan melalui kegiatan-kegiatan karbon hutan yang memenuhi syarat sesuai dengan kerangka kerja akunting di tingkat nasional atau daerah yang tepat.”¹¹ Dengan demikian, proses MOU akan berfokus pada pengembangan kerangka kerja akuntansi di seluruh yurisdiksi yang lebih luas di negara-negara yang merupakan pihak dalam MOU yang bersangkutan, sebagai persyaratan untuk kegiatan-kegiatan yang memenuhi tingkat kepatuhan terhadap REDD yang telah lama ada.

Ketiga, kegiatan-kegiatan REDD yang efektif mensyaratkan aksi-aksi pada yurisdiksi di tingkat negara maupun provinsi serta di tingkat nasional. Hal tersebut secara khusus terjadi di negara-negara seperti Brazil dan Indonesia, di mana kapasitas pemerintah pusat untuk melaksanakan program-program REDD yang disesuaikan dengan keadaan setempat terbatas. Dalam hal tersebut, yurisdiksi di tingkat sub-nasional memberikan keuntungan yang berbeda dalam melibatkan para pemangku kepentingan setempat dan dalam menanggapi ancaman-ancaman dan peluang-peluang setempat. Idealnya, program-program REDD harus mencakup yurisdiksi di tingkat sub-nasional yang disesuaikan dengan keadaan setempat dan dimasukkan ke dalam kerangka kerja akuntansi nasional.

Keempat, debat terus berlangsung di berbagai tingkat tentang *baseline* atau skenario acuan yang tepat yang seharusnya digunakan dalam kegiatan-kegiatan REDD. Untuk sejumlah yurisdiksi, tingkat penebangan hutan secara historis memberikan *baseline* yang memadai. Di yurisdiksi yang lain, proyeksi penebangan hutan di masa mendatang mungkin lebih tepat. Apabila telah terdapat kerja dan pengalaman yang signifikan dengan *baseline* di tingkat proyek untuk kegiatan-kegiatan karbon hutan, penetapan *baseline* atau skenario acuan di tingkat nasional dan provinsi memiliki tantangan yang unik. Dengan demikian, proses MOU akan berfokus pada pemberian perhatian khusus terhadap pengembangan *baseline* yang sesuai untuk negara-negara yang merupakan pihak dalam MOU yang bersangkutan.

Kelima, kemajuan yang signifikan telah dibuat dalam beberapa tahun ini dalam pengembangan dan penggunaan kemampuan penginderaan jarak jauh untuk memantau penebangan hutan dan perubahan penggunaan lahan di negara-negara berkembang. Kemampuan tersebut melengkapi gerakan umum menuju kerangka kerja akunting di tingkat negara/provinsi dan di tingkat nasional, memberikan bagian yang penting dalam landasan untuk upaya-upaya untuk mengukur penebangan hutan di wilayah-wilayah yang luas dan berkaitan dengan kecenderungan historis dengan cara yang transparan dan tersedia bagi publik dengan biaya yang rendah atau tanpa biaya. Daftar inventaris di tingkat dasar diperlukan untuk melengkapi pengamatan berbasis ruang guna menerjemahkan perubahan-perubahan dalam tutupan hutan ke dalam emisi karbon untuk berbagai jenis hutan. Walaupun perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk dilakukannya “*ground thruting*” tersebut sedang dikembangkan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di bidang ini, termasuk dalam

10 Undang-Undang Solusi Pemanasan Global Californi Tahun 2006 (*The California Global Warming Solutions Act of 2006*) (Rancangan Dewan 32).

11 Badan Sumber Daya Udara Californi, Usulan Rencana penetapan ruang lingkup Perubahan Iklim (Oktober 2008; disetujui bulan Desember 2008), di hal. 38 dan 115.

mengembangkan serangkaian metodologi pengambilan sampel yang sah secara statistik untuk mencakup wilayah yang luas dengan biaya yang rendah. Pergerakan dari REDD ke tingkat kepatuhan mensyaratkan dilakukannya pekerjaan secara seksama dalam mengembangkan serangkaian metodologi Pengukuran, Pemantauan, dan Verifikasi (MMV) yang transparan. Proses MOU akan menilai dan memaparkan kemampuan yang ada di bidang ini dengan perhatian utama terhadap pengembangan serangkaian praktik-praktik dan standar-standar yang akan memenuhi persyaratan pasar kepatuhan yang akan timbul.

Akhirnya, upaya-upaya untuk memasukkan REDD ke dalam kebijakan tentang iklim (di tingkat mana pun) tidak akan berhasil apabila penduduk setempat yang bergantung pada hutan dan para pemangku kepentingan lain tidak dimasukkan. Dalam pembahasan REDD di PBB dan dalam usulan perundang-undangan A.S., ketentuan-ketentuan untuk memastikan perlindungan hak-hak dan kepentingan masyarakat setempat, keikutsertaan dan konsultasi dengan masyarakat yang bergantung pada hutan dan penduduk asli di daerah terdampak, dan pembagian manfaat dengan para pemangku kepentingan setempat akan sangat mungkin dimasukkan. California dan negara-negara bagian lain mungkin akan mensyaratkan perlindungan yang serupa mengingat komitmen mereka yang kuat untuk memastikan bahwa penduduk setempat tidak terkena dampak yang merugikan dari peraturan GHG. Oleh karena itu, proses MOU akan berupaya untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan kriteria substantif untuk perlindungan tersebut dan mengusulkan mekanisme untuk memastikan bahwa perlindungan tersebut dalam praktiknya dilaksanakan.

III. Pembentukan Gugus Tugas untuk Masalah Iklim & Sektor Kehutanan di Tingkat Para Gubernur

Tujuan pertama dari upaya pelaksanaan MOU di sektor kehutanan adalah untuk secara formal membentuk gugus tugas – Gugus Tugas untuk Masalah Iklim & di Sektor Kehutanan di Tingkat Gubernur (GCF) – yang terdiri atas para perwakilan utama dari masing-masing negara/provinsi yang merupakan pihak dalam MOU, yang akan bertanggung jawab untuk memimpin upaya pelaksanaan secara keseluruhan. Hal tersebut secara formal dicapai pada tanggal 18 Juni 2009 di Belem¹². Selain itu, GCF memilih California sebagai ketua hingga akhir tahun 2009. Pemilihan ketua untuk tahun 2010 akan dilakukan pada pertemuan GCF di bulan September 2009 di California di mana tanggung jawabnya akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2010.

A. Susunan & Tata Pemerintahan GCF

Sebagaimana ditegaskan di Belem, GCF terdiri atas para perwakilan dari masing-masing negara dan provinsi yang merupakan pihak dalam MOU yang dipilih oleh para Gubernur penandatanganan MOU. Kesembilan negara dan provinsi yang merupakan pihak dalam MOU secara mutlak memilih untuk mengundang Acre sebagai “anggota pendiri” GCF yang ke-10, yang diterima oleh Acre.

Aturan yang mengatur pengambilan keputusan, susunan dan aspek-aspek lain dari kegiatan-kegiatan GCF berikut ini disahkan oleh kesepuluh anggota GCF di pertemuan Belém:

Susunan & Pengambilan Keputusan di GCF

1. Masing-masing negara/provinsi GCF memiliki dua orang perwakilan GCF, yang harus diangkat oleh Gubernur. Hanya satu orang perwakilan dari masing-masing negara/provinsi GCF yang berwenang untuk memberikan suara atas nama negara/provinsi tersebut.

¹² Lebih dari tigapuluh perwakilan negara-negara dan provinsi-provinsi yang merupakan pihak di dalam MOU menghadiri pertemuan Belem, termasuk empat Sekretaris Sumber Daya Manusia dan Lingkungan. Selain itu, sekitar dua puluh lima perwakilan LSM dari sekitar lima belas organisasi di Brazil, Indonesia dan Amerika Serikat menghadiri pertemuan bersama dengan GCF yang berlangsung selama setengah hari pada tanggal 19 Juni 2009 untuk memberikan masukan tentang Rencana Aksi Bersama dan keterlibatan pemangku kepentingan. Gubernur Para Julia Carepa menghadiri jamuan makan malam penutup untuk membahas hasil-hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut.

- a) Gubernur dari negara/provinsi GCF dapat mengangkat LSM-LSM untuk bertugas sebagai perwakilan negara/provinsi tersebut di GCF.
2. Masing-masing negara/provinsi GCF dapat menunjuk pengamat tambahan/para peserta dari pemerintahan yang tidak memiliki hak suara dalam kegiatan-kegiatan GCF dari negara/provinsi tersebut.
3. Keputusan-keputusan di GCF harus diambil melalui musyawarah. Apabila musyawarah tentang pokok-pokok tindakan tidak tercapai, pandangan alternatif akan diperhatikan secara khusus.
4. Jabatan ketua GCF akan digilir setiap tahun dan akan dipegang oleh negara bagian/provinsi dan negara GCF yang berbeda setiap tahun.
5. Kesepuluh anggota GCF yang ada saat ini akan disebut sebagai “para anggota pendiri”.
6. Para anggota baru akan memiliki hak yang sama dengan para anggota pendiri dan akan ditambahkan sebagai berikut:
 - a) Para anggota GCF yang ada saat ini akan mengajukan saran-saran kepada Ketua pada minggu pertama bulan Agustus 2009 terkait dengan negara-negara bagian/provinsi-provinsi pengamat yang akan menghadiri pertemuan di bulan September. Tidak ada batasan jumlah pengamat yang diajukan, namun pada saat ini tidak ada pendanaan yang tersedia bagi para peserta yang tidak merupakan anggota pendiri.
 - b) Para anggota pendiri GCF dapat menyerahkan pengangkatan resmi kepada GCF setelah pertemuan di bulan September 2009.
 - c) Para anggota baru harus diterima melalui musyawarah.
 - d) Para anggota baru harus mengesahkan semua dokumen-dokumen utama GCF.
 - e) Pengumuman tentang para anggota baru akan dilakukan pada COP-15 dan akan berlaku di pertemuan pertama GCF pada tahun 2010.

Koordinasi Kegiatan-Kegiatan GCF dengan Pemerintah Nasional:

Di pertemuan Belem, negara-negara bagian dan provinsi-provinsi GCF mengakui pentingnya pembahasan-pembahasan dan kegiatan-kegiatan kebijakan di tingkat nasional dan internasional dan menyatakan komitmen mereka untuk menjalin kerjasama yang erat dengan badan-badan yang terkait di dalam pemerintah nasional mereka untuk memasukan koordinasi dengan upaya-upaya di dalam dan luar negeri pada tingkat nasional. Terkait dengan hal tersebut, GCF menyepakati prinsip-prinsip panduan berikut ini di pertemuan Belem:

1. Aksi-aksi GCF akan bersifat transparan.
2. Para anggota GCF akan berkomunikasi dengan para perwakilan nasionalnya masing-masing tentang kegiatan-kegiatan GCF.
3. Kemungkinan bagi para perwakilan nasional untuk ikut serta di dalam pertemuan-pertemuan dan kelompok-kelompok kerja GCF dalam kapasitas tertentu akan ditentukan oleh GCF pada pertemuan di bulan September 2009 di California.

Komunikasi:

1. Para anggota GCF bebas untuk memasukkan informasi dasar tentang keikutsertaan mereka di GCF dan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan GCF dalam komunikasi dan bahan-bahan lain, sebagai contoh informasi yang dimuat di dalam dokumen-dokumen yang disepakati oleh GCF, termasuk MOU, Rencana Aksi Bersama dan dokumen-dokumen resmi lain.

2. Dalam keadaan apa pun, GCF tidak dapat dinyatakan mengesahkan, mendukung atau dengan cara lain, mengambil posisi pada proyek atau upaya tertentu apa pun dari anggota atau non-anggota GCF tanpa suara penuh dari para anggota GCF.

Kelompok-kelompok Kerja:

1. Ketiga kelompok kerja di tahun 2009 adalah:
 - a) Standar-standar dan kriteria di tingkat proyek;
 - b) Kerangka kerja akuntansi dan mekanisme-mekanisme koordinasi; dan
 - c) Penilaian kebutuhan
2. Kelompok-kelompok kerja lain dapat dibentuk oleh GCF sebagaimana diperlukan.
3. Kelompok-kelompok kerja akan diketuai oleh para perwakilan negara bagian/provinsi GCF dan masing-masing akan termasuk para peserta LSM/pemangku kepentingan yang lain yang dicalonkan oleh para anggota GCF. (Lihat *infra* di Bagian V (dan Lampiran 4-6) untuk ruang lingkup kerja dan rincian tambahan).

Keikutsertaan LSM dan Pemangku Kepentingan:

1. Sebagian dari masing-masing pertemuan GCF akan diselenggarakan sebagai pertemuan publik bersama dengan LSM-LSM/para pemangku kepentingan.
2. LSM-LSM/para pemangku kepentingan akan diundang oleh para anggota GCF untuk ikut serta dalam ketiga kelompok kerja.

B. Tanggung Jawab GCF

GCF akan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan eksekutif tentang rekomendasi-rekomendasi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan. Untuk tahun 2009, GCF akan memprakarsai pengembangan kerangka kerja, protokol, prinsip, dan kriteria materiil yang diperlukan untuk menghubungkan terciptanya aset karbon hutan yang memenuhi tingkat kepatuhan di masa depan di Brazil dan Indonesia dengan rejim kepatuhan yang berkembang di Amerika Serikat dan di negara lain, dengan perhatian khusus terhadap masalah akunting, pemberian kredit, dan pemantauan karbon hutan. Tugas-tugas tersebut dijelaskan secara lebih terperinci di *infra* bagian IV di bawah ini.

Pada tahun 2010 dan selama jangka waktu yang lebih panjang, GCF akan berfokus pada pengembangan rekomendasi-rekomendasi untuk arsitektur pengaturan pasar kepatuhan dan ketentuan struktural dan material yang diperlukan untuk mengakui aset karbon hutan untuk tujuan kepatuhan dan persyaratan khusus untuk membuat aset karbon hutan yang memenuhi tingkat kepatuhan di Brazil dan Indonesia dalam upaya untuk mengembangkan suatu platform untuk interoperabilitas di masa depan seiring dengan diberlakukannya pasar kepatuhan.

Selain menyelenggarakan dua pertemuan GCF selama tahun 2009 dan mengambil tindakan yang dijelaskan di atas, GCF akan mengembangkan dan memfinalisasi sejumlah keluaran penting sebelum bulan Desember 2009 Konferensi Para Pihak ke-15 dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (*15th United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties (COP-15)*) di Kopenhagen, Denmark. Keluaran tersebut termasuk:

1. **Rencana Aksi Bersama (Bulan Juni/Juli 2009).** Berdasarkan masukan dari pertemuan GCF di bulan Juni 2009 di Belém dan para pemangku kepentingan utama, GCF akan memfinalisasi Rencana Aksi Bersama untuk upaya-upaya pelaksanaan MOU selama tahun 2009-2010.

2. **Laporan Penilaian Protokol (Bulan Agustus/September 2009).** Konsultan Protokol Hutan akan mengembangkan Laporan Penilaian Protokol untuk ditinjau ulang di pertemuan GCF yang kedua pada bulan September 2009 di California. Laporan akan menilai antara lain protokol karbon hutan yang ada dan standar untuk kegiatan-kegiatan terkait REDD untuk menentukan prinsip dan standar mana yang dapat digunakan (dan/atau modifikasi apa yang mungkin diperlukan) untuk mengatur terciptanya penurunan emisi yang memenuhi tingkat kepatuhan dan penyimpanan di Brazil dan Indonesia (dan negara hutan tropis lain) yang dapat diterima oleh rezim kepatuhan yang berkembang di A.S.

3. **Laporan Perkembangan Tahun 2009 (Bulan November 2009).** Pertemuan GCF di bulan September 2009 akan menghasilkan laporan yang mendokumentasikan kemajuan yang dibuat menuju perwujudan ketentuan-ketentuan di sektor kehutanan dalam MOU dan pelaksanaan syarat-syarat Rencana Aksi Bersama. Laporan tersebut juga akan memaparkan secara garis besar tujuan-tujuan untuk 2010 dan selanjutnya dan meluncurkan proses untuk mengembangkan (dan menjamin dukungan keuangan untuk) penilaian kebutuhan di tingkat negara dan strategi karbon hutan di Brazil dan Indonesia. The MOU Governors will present the 2009 Progress Report at COP-15.

Sambil menunggu dukungan keuangan, GCF bermaksud untuk menyelenggarakan dua pertemuan tindak lanjut tambahan di tahun 2010. Lampiran 7 memberikan jadwal terperinci tentang pertemuan-pertemuan tambahan, peristiwa penting yang utama di dalam proses legislatif dan pengaturan yang bersangkutan, dan keluaran dan hasil-hasil kegiatan utama untuk tahun 2009-2010.

C. Dukungan GCF

GCF memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan di dalam proses MOU. Para pemimpin dan staf GCF yang ditunjuk dari masing-masing negara/provinsi bertanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Aksi Bersama ini dan Pasal-Pasal di dalam MOU. Kelompok tersebut mengadakan pertemuan melalui sambungan telepon jarak jauh yang dijadwalkan secara rutin.

Selain menyediakan dukungan keuangan untuk kedua pertemuan GCF di tahun 2009, hibah dari *Moore and Packard Foundation* juga mendukung Penasihat GCF Advisor, Konsultan Protokol Hutan, dan Para Koordinator Lokakarya. Badan Sumber Daya Alam California bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses dan mengkoordinasikan semua kegiatan di antara para negara/provinsi, konsultan, dan pemangku kepentingan.

Penasihat GCF adalah Dr. William Boyd, seorang profesor rekanan di bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Colorado. Beliau bertanggung jawab untuk (1) mengelola hibah dari *Moore and Packard* untuk kegiatan-kegiatan pelaksanaan MOU; (2) memberikan saran kepada GCF dan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan GCF; (3) merancang Rencana Aksi Bersama dan Laporan Perkembangan; (4) melakukan tatap muka dengan LSM-LSM dan para pemangku kepentingan lain atas nama GCF; (5) membantu penyuluhan dan koordinasi dengan masyarakat kebijakan REDD yang lebih luas; dan (6) menjaga agar GCF mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang terkait dalam debat kebijakan REDD yang lebih luas yang dapat mempengaruhi proses MOU. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Dr. Boyd juga bergantung pada bantuan dari staf di Pusat Energi & Jaminan Lingkungan Hidup Fakultas Hukum Universitas Colorado.

Konsultan Protokol Hutan John Nickerson, atas nama Badan Pelestarian Aksi untuk Masalah Iklim (CAR). Beliau bertanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis pada aturan di tingkat proyek yang diperlukan untuk bergerak menuju karbon hutan yang memenuhi tingkat kepatuhan negara-negara/provinsi yang merupakan pihak dalam MOU. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Mr. Nickerson menyusun Laporan Penilaian Protokol untuk ditinjau ulang di pertemuan kedua GCF di bulan September 2009.

Dukungan teknis tambahan untuk kegiatan-kegiatan GCF mungkin diperlukan seiring dengan berlangsungnya

kegiatan-kegiatan pelaksanaan. GCF berkomitmen untuk menjamin dukungan keuangan tambahan untuk kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana diperlukan.

IV. Memfasilitasi Keikutsertaan LSM & Pemangku Kepentingan

Tujuan kedua dari Rencana Aksi Bersama di pertemuan Belém adalah untuk menetapkan proses untuk memfasilitasi LSM dan keikutsertaan pemangku kepentingan di dalam proses pelaksanaan MOU selama tahun 2009 dan 2010. Pada pertemuan GCF tanggal 18-19 Juni 2009 di Belem, ditentukan bahwa keikutsertaan LSM dan pemangku kepentingan secara formal utamanya akan dilakukan melalui ketiga kelompok kerja yang dibentuk pada pertemuan tersebut.

Negara-negara bagian/provinsi-provinsi yang merupakan pihak di dalam MOU mengidentifikasi para pemangku kepentingan tertentu untuk ikut serta dalam pertemuan Belem dan kegiatan-kegiatan lanjutan (lihat Tabel 2). Namun, pertemuan akan diperluas sehingga mencakup LSM-LSM yang dianggap penting untuk mencapai tujuan-tujuan di dalam MOU. Diperkirakan bahwa daftar LSM/pemangku kepentingan yang ikut serta di dalam bagian bersama GCF/LSM pada pertemuan GCF di bulan September 2009 di California akan semakin bertambah.

Tabel 2. Para Perwakilan Utama LSM dan Pemangku Kepentingan

Negara/Provinsi	LSM yang Ditunjuk	Kontak(-kontak) Utama
Amapa (1), (2)	(1) Konservasi Alam – Brazil	(1) Ana Cristina Barros (Amapa): acbarros@tnc.org; Miguel Calmon: mcalmon@tnc.org (Para); Edenise Garcia: egarcia@tnc.org (Mato Grosso)
Amazonas (3), (4)	(2) <i>Conservação Internacional</i> -Brasil	(2) Paulo Gustavo do Prado Pereira: pprado@conservacao.org
Mato Grosso (1), (5)	(3) <i>Fundação Amazonas Sustentável</i> – FAS (Yayasan Pelestarian Amazon) Pengembangan Amazon)	(3) Virgilio Maurício Viana; email: virgilio.viana@fas-amazonas.org
Pará [1]	(4) <i>Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas</i> – IDESAM (Lembaga Konservasi dan Pembangunan Lestari Amazon)	(4) Mariano Colini Cenamo; email: mariano@idesam.org.br
Acre (6), (7)	(5) ICV	(5) Laurent Micol; laurent.micol@icv.org.br
	(6) WWF-Brasil	(6) Anthony Anderson (<i>mudanças climáticas</i>): anthony@wwf.org.br & Carlos Scaramuzza (direktur)
	(7) PESACRE – <i>Grupo de Pesquisa e Educação Agroflorestal do Acre</i>	(7) Eduardo Borges (direktur)
	(8) IPAM	(8) Paulo Moutinho
	(9) <i>Aliança da Terra</i>	(9) John Carter
Aceh	(1) Ulu Masen – <i>Fauna & Flora Int'l</i> (FFI)	(1) Matt Linkie
Papua	(2) Leuser – Yayasan Internasional Leuser (<i>Leuser Int'l Foundation</i>) (LIF); PanEco; Yayasan Ekosistem Leuser (<i>Leuser Ecosystem Foundation</i>) (YEL)	(2) TBD
California	(1) Konservasi Alam (<i>The Nature Conservancy</i>)	(1) Louis Bloomberg: lblumberg@tnc.org
Illinois	(2) Konservasi Internasional (<i>Conservation International</i>)	(2) Toby Jansen-Smith
Wisconsin	(3) Dana Pertahanan Lingkungan Hidup (<i>Environmental Defense Fund</i>)	(3) Steve Schwarzman: ssschwarzman@edf.org; Derek Walker: dbwalker@edf.org
	(4) <i>Tren Hutan</i> (<i>Forest Trends</i>)	(4) Michael Jenkins: mjenkins@forest-trends.org

Harapannya adalah bahwa para peserta kelompok-kelompok kerja dan kegiatan-kegiatan GCF lain yang berasal dari A.S. akan mendukung keikutsertaannya di dalam kegiatan-kegiatan GCF melalui anggaran yang ada atau upaya-upaya

pengumpulan dana khusus oleh mereka. Pendanaan yang terbatas melalui hibah dari *Moore and Packard* tersedia bagi para peserta kelompok kerja dan pertemuan dari Brazil dan Indonesia untuk menghadiri pertemuan-pertemuan GCF di tahun 2009.

GCF akan meminta LSM dan para pemangku kepentingan lain untuk memberikan masukan kepada GCF tentang kekhawatiran pemangku kepentingan yang utama; bantuan teknis untuk masalah-masalah pelaksanaan; dan dukungan logistik untuk pertemuan-pertemuan GCF di bulan Juni dan September. Seiring dengan mulai terbentuknya keanggotaan di dalam kelompok-kelompok kerja, GCF akan memprakarsai gugus-gugus tugas untuk masalah-masalah teknis yang utama (seperti pengembangan strategi-strategi REDD di tingkat negara).

LSM-LSM dan para pemangku kepentingan yang lain juga dapat diminta untuk membantu upaya-upaya pemerintah negara/provinsi di Brazil dan Indonesia, mendorong upaya-upaya pembuatan peraturan yang sedang berlangsung di California dan Amerika Serikat, membantu menggerakkan investasi sektor swasta ke dalam kegiatan-kegiatan percontohan karbon hutan, dan membantu menetapkan standar dan kerangka kerja untuk menetapkan prioritas kegiatan-kegiatan yang menghasilkan manfaat-manfaat tambahan selain karbon, termasuk mata pencaharian lokal, air, keanekaragaman hayati, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

V. Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan MOU di Sektor Kehutanan (2009-2010)

Tujuan ketiga dari Rencana Aksi Bersama adalah untuk memprakarsai pelaksanaan ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan. Upaya-upaya selama tahun 2009-2010 akan berfokus pada pengembangan rekomendasi-rekomendasi tentang infrastruktur pengaturan dan kelembagaan yang diperlukan untuk menghasilkan kompensasi yang memenuhi tingkat kepatuhan dari kegiatan REDD dan kegiatan karbon hutan internasional lain di Brazil dan Indonesia (dan negara-negara hutan tropis lain) yang dapat dipertimbangkan untuk diakui di dalam sistem kepatuhan terhadap GHG yang berkembang di Amerika Serikat dan di tempat lain. Dengan demikian, perhatian akan diarahkan pada proses pembuatan peraturan California AB yang sedang berlangsung (diuraikan di Lampiran 2), yang harus diselesaikan pada akhir tahun 2010, serta upaya-upaya kepatuhan terhadap GHG di tingkat negara dan tingkat regional yang terkait seperti Prakarsa Iklim Barat (*Western Climate Initiative*) dan Perjanjian Gas Rumah Kaca Midwest (*Midwest Greenhouse Gas Accord*), dan pada akhirnya upaya negara Federal untuk mengembangkan sistem kepatuhan terhadap GHG yang komprehensif untuk Amerika Serikat. Penerimaan setiap kompensasi karbon hutan ke dalam sistem kepatuhan terhadap GHG tertentu akan tunduk kepada kajian menyeluruh dan persetujuan badan yang bersangkutan dalam masing-masing sistem kepatuhan.

Karena upaya di tingkat negara bagian dan di tingkat regional di Amerika Serikat tampaknya akan pada akhirnya mencakup program Federal, sangat penting bahwa upaya pelaksanaan MOU dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ciri-ciri umum sistem Federal yang sedang berkembang. Demikian pula, kegiatan-kegiatan di Brazil dan Indonesia akan mempengaruhi upaya-upaya di tingkat nasional. Sebagai contoh, pada bulan Desember 2008, Brazil meluncurkan Rencana Nasional tentang Perubahan Iklimnya, yang mensyaratkan penurunan angka penebangan pohon di Brazil hingga 70 persen (sebagaimana dibandingkan dengan *baseline* angka penebangan hutan tahun 1996-2005) dalam jangka waktu sepuluh tahun dan menciptakan Dana Amazon sebagai mekanisme untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut melalui iuran sukarela, yang akan berubah menjadi platform untuk kerjasama antar negara dalam REDD. Indonesia memfinalisasi peraturan pemerintah pusat tentang REDD, Peraturan No. P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penurunan Emisi dari Penebangan Pohon dan Degradasi Hutan, pada tanggal 1 Mei 2009, dengan demikian menetapkan rezim hukum nasional pertama di dunia untuk pelaksanaan proyek-proyek REDD dan penerbitan kredit karbon untuk setiap penurunan yang dihasilkannya. Hal tersebut segera diikuti dengan Peraturan Menteri Kehutanan yang lain, P.36/Menhut-II/2009, yang diyakini merupakan peraturan pertama di dunia tentang bagi hasil yang mengatur proyek-proyek karbon hutan. Cara kerja dari peraturan-peraturan tersebut dan dampaknya pada kegiatan-kegiatan di tingkat daerah akan dipaparkan dalam peraturan-peraturan tambahan dan pelaksanaan di masa mendatang. Akhirnya, karena REDD

tampaknya akan dimasukkan ke dalam perjanjian perubahan iklim internasional pasca tahun 2012, negara-negara bagian dan provinsi-provinsi GCF berkomitmen untuk melanjutkan dengan cara yang sesuai dengan upaya-upaya tersebut dengan perhatian khusus terhadap kerja metodologi dan dimasukkannya kegiatan-kegiatan di tingkat daerah.

Berdasarkan masukan dari masing-masing negara bagian/provinsi GCF, Lampiran 2 memuat rincian ringkasan peraturan perundang-undangan dan strategi yang ada terkait dengan REDD dan karbon hutan di negara bagian/provinsi GCF serta uraian singkat tentang sejumlah proyek REDD yang sedang berlangsung di Brazil dan Indonesia. Sebagaimana dibuktikan oleh ringkasan di Lampiran 2 dan Tabel 2 di atas, kegiatan-kegiatan REDD di negara bagian/provinsi GCF sangat beragam, dan masing-masing negara/provinsi GCF memiliki serangkaian kemampuan dan kebutuhan yang berbeda terkait dengan kegiatan-kegiatan REDD.

Dengan demikian, kegiatan-kegiatan pelaksanaan di sektor Kehutanan untuk tahun 2009-2010 akan berfokus pada tiga bidang yang substantif yang masing-masing akan dibahas secara lebih terperinci di bawah ini:

(1) Standar-Standar & Kriteria di Tingkat Proyek: standar-standar dan kriteria untuk kegiatan-kegiatan yang memenuhi tingkat kepatuhan terhadap REDD di tingkat proyek atau lokasi tertentu;

(2) Koordinasi dan Akunting: kerangka kerja akunting dan mekanisme koordinasi, termasuk opsi-opsi pemberian kredit, untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan REDD dipertanggungjawabkan dengan sebagaimana mestinya dan dihargai di tingkat negara/provinsi dan/atau nasional, dikoordinasikan dengan strategi REDD di tingkat negara/provinsi, dan nasional, dan sesuai dengan persyaratan untuk keikutsertaan lokal dan pembagian manfaat; dan

(3) Penilaian Kebutuhan: penilaian kebutuhan teknis, kelembagaan, dan di bidang hukum untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang memenuhi tingkat kepatuhan terhadap REDD di negara/provinsi yang merupakan pihak dalam MOU.

Pada pertemuan Belém, GCF membentuk kelompok kerja yang terdiri atas personel dari negara bagian/provinsi GCF yang bersangkutan dan para anggota utama dari Dewan Penasihat yang terdiri dari LSM dan pemangku kepentingan, masyarakat dan para ahli lain yang terkait di masing-masing ketiga bidang tersebut. Kelompok kerja Penilaian Kebutuhan mungkin akan mendapat tugas terpisah yang berfokus pada setiap negara bagian/provinsi GCF. Kelompok kerja tersebut akan melapor kembali kepada GCF di pertemuan yang diadakan di bulan September 2009 di California dan secara berkala setelah itu.

Sebagaimana dibahas dalam bagian pendahuluan, Rencana Aksi Bersama ini didasarkan pada pengamatan bahwa rezim kepatuhan di tingkat nasional dan daerah yang berkembang di Amerika Serikat nampaknya tidak akan menerima kredit kompensasi dari proyek-proyek REDD mandiri di Brazil atau Indonesia. Alih-alih, kegiatan REDD di negara tersebut (dan secara luas di negara-negara bagian di Brazil dari provinsi-provinsi di Indonesia yang merupakan pihak dalam MOU) mungkin akan perlu untuk dimasukkan ke dalam kerangka kerja akunting di tingkat negara, regional, atau di tingkat nasional.

Selain itu, walaupun terdapat pertumbuhan proyek yang bertujuan pada pasar sukarela dan keragaman standar dan kriteria yang ada untuk kegiatan tersebut, tampaknya rezim kepatuhan di nasional dan daerah di Amerika Serikat tidak akan mungkin menerapkan standar dari pasar sukarela. Di saat yang bersamaan, negara bagian/provinsi GCF mengakui pekerjaan penting yang telah dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan standar dan protokol seperti Standar Karbon Sukarela (*Voluntary Carbon Standard (VCS)*), Standar Iklim, Masyarakat & Keanekaragaman Hayati (*Climate, Community & Biodiversity Standards (CCBS)*), dan Protokol Hutan Lestari Aksi Iklim (*Climate Action Reserve Forest Protocol*), dan akan melakukan setiap upaya untuk belajar dari dan menerapkan standar tersebut pada konteks kepatuhan dan memasukkannya sebagai bagian dari transisi menuju proyek di skala sub-nasional dan nasional.

Berdasarkan kerjanya selama tahun 2009-2010, GCF akan membuat rekomendasi tentang standar-standar/kriteria dan kerangka kerja akunting agar dimasukkan ke dalam proses pembuatan peraturan California AB 32 dan upaya-upaya

pengaturan lain di tingkat negara, regional dan nasional. Ketepatan waktu dari proses AB 32 dan pembuatan peraturan lain yang terkait di A.S. dijelaskan secara terperinci dalam Lampiran 2. Secara ringkas, ARB pada saat ini mengembangkan aturan-aturan kompensasi, yang harus final pada akhir tahun 2010.

A. Standar-Standar & Kriteria di Tingkat Proyek

Untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan REDD di Brazil dan Indonesia memenuhi persyaratan Pasal 2 (b) dari MOU, kriteria harus dipaparkan dengan jelas dan mengidentifikasi dengan tepat mutu yang diinginkan untuk standar tersebut. Selain itu, kriteria dan standar perlu disatukan dengan mekanisme kepatuhan yang ditetapkan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, selama tahun 2009 dan 2010, GCF, melalui kerja John Nickerson, Konsultan Protokol dan Kelompok Kerja Standar-Standar dan Kriteria, diketuai oleh Ernesto Roessing (Amazonas)¹³ akan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. **Mengidentifikasi Kriteria untuk Dapat Memenuhi Syarat bagi Kegiatan di Tingkat Proyek.** Suatu daftar kriteria agar kegiatan-kegiatan di tingkat proyek dapat memenuhi syarat akan dikembangkan dan ditentukan. Kriteria tersebut akan mencakup tema-tema utama seperti pemenuhan persyaratan, penambahan, dampak sekunder, pengukuran, sifat permanen, pemantauan & verifikasi, dan manfaat tambahan proyek. Masing-masing tema akan dipaparkan dan mutu standar yang dikehendaki akan dirinci karena mutu tersebut berkaitan dengan akunting proyek. Mutu standar yang dikehendaki akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi persyaratan protokol dari mekanisme kepatuhan yang ada yang digunakan oleh masing-masing pihak. Rancangan awal tentang Matriks Standar & Kriteria tercantum dalam Lampiran 4 Rencana Aksi Bersama ini.
2. **Menstandarisasi Proyek-Proyek Lintas.** Sementara proyek karbon hutan semua berbasis di lokasi di Amerika Serikat, proyek-proyek REDD di Brazil dan Indonesia dapat mencakup skala yang jauh lebih besar dan terikat dengan kebijakan, program, atau sektor. Tantangan yang signifikan muncul dalam menyatukan kegiatan-kegiatan REDD di tingkat proyek di seluruh daerah, di seluruh upaya-upaya internasional lain, dalam pasar sukarela yang ada saat ini, dan dalam pasar kepatuhan yang berkembang. Tantangan tersebut akan dinilai untuk menunjukkan bagaimana dan di mana pendekatan yang terstandarisasi dapat digunakan dan masalah-masalah mana yang harus diselesaikan agar pengembangan aset-aset karbon hutan pengganti dapat dilakukan.
3. **Mengevaluasi Kemampuan Standar-Standar dan Kriteria untuk Dapat Diterapkan.** Matrix Standar & Kriteria (Lampiran 4) akan dibandingkan dengan protokol-protokol dan standar-standar karbon hutan yang ada untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan REDD. Matriks tersebut akan menjadi dasar di mana Laporan Penilaian Protokol dapat menentukan bagaimana protokol dan standar tersebut dapat digunakan dalam konteks MOU dan bagaimana, apabila ada, modifikasi yang diperlukan. Daftar awal protokol dan standar untuk evaluasi termasuk:
 - a. **Standar Karbon Sukarela (*Voluntary Carbon Standard (VCS)*):** Aturan pertanian dan kehutanan Standar Karbon Sukarela (*Voluntary Carbon Standard*) (VCS – www.v-c-s.org) diluncurkan pada bulan November 2008, yang merupakan hasil proses pengembangan selama dua tahun yang termasuk penyusunan rancangan oleh para ahli terkemuka, kajian rekan sejawat, dan konsultasi pemangku kepentingan. VCS telah menetapkan dirinya sebagai standar akunting karbon yang utama bagi

¹³ Para anggota Kelompok Kerja Standar-Standar dan Kriteria yang lain adalah sebagai berikut: Aceh; Acre; Amapa; California; Illinois; Mato Grosso; Wisconsin; and para perwakilan LSM *Amazonas Sustainable Foundation* (FAS), *Center for Clean Air Policy*, *Conservation International* (U.S.), *Environmental Defense Fund*, *Institute for Conservation and Sustainable Development of Amazonas* (IDESAM), *Institute for Environmental Research of the Amazon* (IPAM), *The Nature Conservancy* (U.S. dan Brazil), dan *World Wildlife Fund* (Brazil). Ruang Lingkup Pekerjaan Kelompok Kerja ini tersedia di Lampiran 4.

proyek-proyek REDD dan sedang, atau direncanakan agar, digunakan oleh semua proyek besar REDD di seluruh dunia, termasuk di Brazil dan Indonesia. Selain itu, VCS mencakup semua kegiatan kehutanan yang dimuat berdasarkan MOU – REDD, pemulihan dan penghijauan, dan peningkatan pengelolaan hutan – yang memungkinkan terciptanya pengganti kredit karbon tanpa mengindahkan kegiatan kehutanan yang dihasilkannya. VCS menggunakan pendekatan buffer gabungan untuk menangani risiko proyek dan memastikan sifat permanen kredit karbon yang diterbitkan.

- b. Standar Iklim, Masyarakat & Keanekaragaman Hayati (Climate, Community & Biodiversity Standards) (CCBS): Standar Iklim, Masyarakat & Keanekaragaman Hayati (*Climate, Community & Biodiversity Standards*) (CCBS – www.climate-standards.org) berfokus pada rancangan proyek dan manfaat sosial dan keanekaragaman hayati yang lebih luas dari proyek-proyek tersebut. Bagi proyek-proyek REDD, standar tersebut biasanya diterapkan bersama dengan VCS, yang berfokus semata-mata pada mutu penurunan emisi atau penyimpanan yang dihasilkan oleh proyek-proyek karbon hutan. Sekitar 100 proyek menggunakan CCBS, termasuk semua proyek karbon hutan skala besar di Brazil dan Indonesia. CCBS dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya proyek karbon hutan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat dan melestarikan keanekaragaman hayati yang memenuhi syarat untuk pemberian kredit.
 - c. Protokol Hutan Badan Pelestarian Aksi Iklim (Climate Action Reserve Forest Protocol) (California): Protokol hutan Badan Pelestarian Aksi Iklim (*Climate Action Reserve*) (CAR) (www.climateactionreserve.org), yang berlaku terhadap proyek kompensasi karbon hutan di California, telah dikembangkan dengan kolaborasi yang erat dengan Badan Sumber Daya Udara California dan proses yang diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan. Protokol tersebut menggunakan pendekatan yang terstandarisasi pada penetapan *baseline*, pengukuran, dan verifikasi dan telah mengembangkan pendekatan untuk mengelola sifat permanen kompensasi karbon hutan melalui penggabungan *buffer* yang terstandarisasi berdasarkan risiko masing-masing proyek dan perjanjian berdasarkan kontrak yang disyaratkan antara pemilik hutan dan *Climate Action Reserve* memastikan terjaminnya manfaat-manfaat dari iklim. Protokol dijadwalkan akan dipertimbangkan untuk pengesahan oleh Badan Sumber Daya Udara pada bulan September 2009. Walaupun dikembangkan untuk proyek kompensasi karbon hutan “domestik” di California, Protokol tersebut menyoroti masalah-masalah utama yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan peraturan untuk kompensasi karbon hutan internasional berdasarkan Undang-Undang Solusi Pemanasan Global AB 32, California.
4. **Menilai Pemilihan Kegiatan Proyek REDD yang Berkelanjutan dengan Pendekatan yang Terstandarisasi.** Setelah mengembangkan sebuah daftar inventaris tentang standar-standar dan kriteria yang terkait dan mengevaluasi standar-standar dan protokol yang ada, pemilihan kegiatan proyek REDD yang berkelanjutan dan diusulkan akan dinilai terhadap standar dan kriteria yang dikehendaki, dan pendekatan terstandarisasi akan dikembangkan yang dapat menjadi dasar untuk rekomendasi pembuatan peraturan oleh GCF. Perbandingan tersebut, yang akan mencakup tinjauan ulang di tingkat dasar, akan memberikan umpan balik yang penting tentang kesenjangan khusus antara proyek-proyek yang ada saat ini dan persyaratan untuk menciptakan kredit karbon kredit yang memenuhi tingkat kepatuhan di masa mendatang.
 5. **Menentukan Konteks Proyek-Proyek REDD dengan Jenis-Jenis Proyek Lain.** Selain penyesuaian di seluruh daerah dan pasar, kegiatan-kegiatan hutan proyek REDD dan penurunan emisi yang dihasilkan akan dibandingkan dengan jenis-jenis proyek lain seperti penghijauan kembali, penanaman kembali dan peningkatan pengelolaan hutan. Hal tersebut akan menjelaskan definisi-definisi jenis-jenis proyek dan memberikan konteks terhadap setiap perbedaan yang dirasakan dalam penurunan emisi yang dihasilkan

dari berbagai jenis proyek.

B. Kerangka Kerja Akunting & Mekanisme Koordinasi

Selain memenuhi kriteria dan standar-standar di tingkat proyek, kegiatan-kegiatan REDD yang dapat diakui di rezim kepatuhan yang berkembang di California dan Amerika Serikat harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan dihargai di tingkat negara bagian dan/atau di tingkat nasional dengan cara yang sesuai di seluruh yurisdiksi yang berbeda dan yang menghindari masalah-masalah penghitungan ganda seiring dengan Bergeraknya negara-negara bagian dan provinsi ke akunting tingkat nasional. Sebagaimana dicatat sebelumnya, Rencana Ruang Lingkup ARB California secara tegas mendukung konsep penerimaan kompensasi dari “yurisdiksi yang menunjukkan kinerja. . . dalam mengurangi emisi atau meningkatkan penyimpanan melalui kegiatan-kegiatan karbon hutan yang memenuhi syarat sesuai dengan kerangka kerja akunting yang sesuai di tingkat nasional atau daerah.”¹⁴

Demikian pula, usulan perundang-undangan federal di A.S. (khususnya H.R. 2454) menetapkan bahwa kompensasi dari kegiatan-kegiatan REDD di tingkat daerah di Brazil dan Indonesia akan diputuskan berdasarkan kinerja terkait dengan *baseline* penebangan hutan di tingkat negara bagian atau provinsi, dengan mempertimbangkan rata-rata tingkat penebangan hutan historis selama jangka waktu sekurang-kurangnya lima (5) tahun.¹⁵ Usulan perundang-undangan juga mensyaratkan bahwa setiap kegiatan di tingkat negara bagian/provinsi sesuai dengan komitmen atau aksi penanggulangan yang tepat di tingkat nasional. Terdapat penggunaan bahasa yang kuat dalam usulan perundang-undangan di A.S. tentang hak-hak dan kepentingan dari dan pembagian manfaat dengan masyarakat setempat dan penduduk asli. Akhirnya, dalam bentuknya yang terbaru, usulan perundang-undangan menetapkan kompensasi dari kegiatan di tingkat daerah tersebut lima tahun setelah berlakunya sistem kepatuhan A.S., di mana hanya penurunan di tingkat nasional dari Brazil atau Indonesia yang akan diperkenankan sebagai kompensasi terhadap sistem kepatuhan A.S..

Walaupun rincian dari ketentuan-ketentuan tampaknya akan mengubah debat legislatif dan pengaturan di masa mendatang, garis besarnya mungkin akan bertahan. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan REDD di tingkat proyek yang memenuhi standar-standar dan kriteria akan pula ditanamkan di dalam kerangka kerja akunting yang sesuai agar dapat diakui di A.S. Sama halnya, mekanisme koordinasi perlu dikembangkan sehingga dapat memastikan kesesuaian di seluruh yurisdiksi dan di antara negara bagian/provinsi dan tingkat nasional serta memberikan kepercayaan diri yang memadai bahwa pemasukan karbon akan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Dengan demikian, selain dari kerja yang berkaitan dengan standar-standar dan kriteria di tingkat proyek, GCF dan Kelompok Kerja Kerangka Kerja Akuntansi & Mekanisme-Mekanisme Koordinasi, yang diketuai oleh Jefferson de Casto (Mata Grosso) dan dengan dibantu oleh Penasihat GCF, William Boyd¹⁶ akan memberikan perhatian khusus selama tahun 2009 dan 2010 terhadap pengembangan kerangka kerja akunting dan mekanisme koordinasi yang memadai, termasuk opsi-opsi pemberian kredit, bagi kegiatan-kegiatan di tingkat negara bagian dan provinsi.

GCF secara khusus tertarik untuk menjajaki model yang mungkin tersedia untuk kerjasama multinegara atau regional, seperti Dana Amazon (*Amazon Fund*) di Brazil,¹⁷ yang mungkin dapat berkembang menjadi dasar bagi kerjasama di antara negara-negara bagian GCF di Brazil tentang akuntansi REDD serta memberikan mekanisme kelembagaan untuk pembagian pemasukan karbon dengan cara yang transparan dan berkeadilan (*lihat* Lampiran 5: Kerangka Kerja Model untuk Koordinasi REDD). Selama tahun 2009-2010, GCF akan berfokus untuk menilai dan meningkatkan kerangka

14 Badan Sumber Daya Udara California, *Usulan Rencana penetapan ruang lingkup Perubahan Iklim* (Oktober 2008; disetujui Desember 2008), pada hal. 38 dan 115.

15 Usulan perundang-undangan secara tegas menetapkan bahwa “faktor-faktor lain,” yang dapat mencakup perkiraan emisi dari penebangan hutan di masa mendatang, dapat dipertimbangkan dalam menetapkan *baseline* penebangan hutan di tingkat negara atau provinsi.

16 Para anggota dari Kelompok Kerja Kerangka Kerja Akuntansi & Mekanisme-Mekanisme Koordinasi yang lain adalah sebagai berikut: Amazonas; California; Illinois; Papua; dan para perwakilan LSM Pertahanan Lingkungan (*Environmental Defense*), Forest Trends, IPAM, dan IDESAM. Ruang Lingkup Kerja Kelompok Kerja ini tersedia di Lampiran 5.

17 Lihat Lampiran 3 untuk uraian tentang Dana Amazon (*Amazon Fund*).

kerja akunting dan kemampuan yang terdapat pada negara-negara bagian/provinsi-provinsi GCF dan mengembangkan mekanisme untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan REDD di seluruh tingkat pemerintahan yang berbeda.

1. Kerangka Kerja Akunting & Kemampuan: Kegiatan-kegiatan GCF di dalam bidang ini akan berfokus pada 4 bidang utama:

- a. Daftar Inventaris Karbon Hutan dan Kemampuan Pemantauan: Walaupun terdapat kesepakatan umum di masyarakat teknis dan kebijakan REDD bahwa teknologi penginderaan jarak jauh yang ada yang dikombinasikan dengan “*ground truthing*” dapat memberikan informasi yang memadai tentang persediaan karbon hutan dan kemampuan yang berkelanjutan untuk memantau penebangan hutan di wilayah yang luas, kemampuan tersebut belum merata dan belum digunakan dalam konteks kepatuhan. Walaupun terdapat antusiasme yang cukup besar terkait dengan kemampuan penginderaan jarak jauh, terdapat kebutuhan khusus akan kemampuan “*ground-truthing*” yang sesuai dengan Pedoman Praktis yang Baik untuk Penggunaan Lahan dan Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan IPCC yang ada. Selama tahun 2009-2010, GCF akan menilai kemampuan yang ada dalam negara-negara bagian/provinsi-provinsi GCF untuk memanfaatkan penginderaan jarak jauh dan praktik-praktik daftar inventaris hutan untuk pemetaan karbon hutan. GCF juga akan bekerja sama dengan para ahli teknis untuk mengembangkan platform yang transparan dan ramah untuk pengguna untuk memetakan perubahan-perubahan dalam persediaan karbon hutan seiring dengan berjalannya waktu dengan cara yang memungkinkan akunting karbon yang tepat. Tujuan keseluruhannya adalah untuk mengembangkan peta hutan di tingkat negara/provinsi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memantau kinerja menuju dan yang kompatibel dengan upaya-upaya pemetaan yang serupa di tingkat negara/provinsi dan/atau nasional.
- b. Baseline dan Skenario Acuan: Walaupun masih terdapat cukup banyak debat tentang cara penetapan *baseline* dan skenario acuan, dengan sejumlah tingkat penebangan hutan historis dan rata-rata atau perkiraan penebangan di masa depan lain yang berguna, GCF akan mengkaji pendekatan-pendekatan yang ada terkait dengan persyaratan di rezim kepatuhan yang berkembang dan mengembangkan rekomendasi untuk negara-negara bagian/provinsi-provinsi GCF. Tujuan keseluruhannya adalah untuk mengembangkan serangkaian metodologi *baseline* yang fleksibel yang cukup untuk menangkap keadaan yang berbeda yang terjadi di berbagai yurisdiksi sementara juga memenuhi kebutuhan akan rezim kepatuhan. Dalam sejumlah kasus, hal tersebut mungkin mensyaratkan pengembangan *baseline* tunggal, bersama untuk beberapa negara.
- c. Daftar Karbon Hutan: Akunting di tingkat nasional dan daerah untuk REDD (dan karbon hutan yang lain) akan membutuhkan pengembangan daftar publik untuk semua kegiatan di tingkat proyek (baik di tingkat negara/provinsi atau di tingkat nasional dan regional). Daftar tersebut harus dibuat berdasarkan infrastruktur daftar GHG yang ada, dengan kemampuan untuk menjajaki semua transaksi, akuisisi, pembatalan, dan penghentian kredit hutan dengan cara yang transparan dan dapat diakses oleh publik. GCF akan menilai praktik-praktik daftar GHG yang ada, menyusun pelajaran yang terkait, dan memfasilitasi pengembangan daftar karbon hutan di negara-negara/provinsi yang merupakan pihak dalam MOU. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dikoordinasikan secara seksama dengan setiap kegiatan pembentukan daftar di tingkat nasional (atau internasional) untuk menghindari penghitungan ganda dan harus disusun dengan cara yang memperkenankan dimasukkan dan disesuaikannya daftar tersebut ke dalam daftar GHG yang lebih komprehensif di masa mendatang. Tujuan keseluruhannya adalah untuk mengembangkan prototipe atau model daftar karbon hutan yang dapat digunakan oleh berbagai negara bagian/provinsi GCF.

- d. Verifikasi dan Keberlakuan: Setiap kompensasi yang diperkenankan masuk ke dalam sistem kepatuhan nasional dan daerah di A.S. harus “diverifikasi” dan harus “dapat diberlakukan.” Apabila penurunan (atau penyimpanan) diukur terhadap *baseline* di tingkat negara atau provinsi, verifikasi dan keberlakuan menjadi semakin rumit. GCF akan menjajaki praktik-praktik yang berbeda untuk memverifikasi kegiatan-kegiatan REDD di Brazil dan Indonesia dalam konteks penurunan yang dipertanggungjawabkan di tingkat nasional dan/atau daerah, termasuk kemungkinan menggabungkan sertifikasi pihak ketiga dan verifikasi kegiatan-kegiatan di tingkat nasional dengan indikator-indikator kinerja di tingkat daerah. Selain itu, pertanyaan keberlakuan tentang kredit kompensasi internasional perlu dijajaki secara seksama, dengan memberikan perhatian khusus kepada kemungkinan digunakannya aturan-aturan kewajiban, instrumen asuransi, *buffer*, dan/atau cadangan kredit sebagai perangkat untuk menghadapi pertanyaan keberlakuan kompensasi di seluruh yurisdiksi.
2. **Mekanisme Koordinasi**: Sesuai dengan pekerjaannya terkait dengan kerangka kerja dan kemampuan akunting, GCF juga akan berfokus pada sejumlah masalah koordinasi di tahun 2009-2010:
- a. **Perencanaan REDD**: Perencanaan REDD di tingkat nasional dan daerah merupakan prasyarat bagi koordinasi yang tepat untuk kegiatan-kegiatan REDD di dalam dan di antara yurisdiksi yang berbeda. Rencana tersebut juga diperlukan berdasarkan sistem kepatuhan terhadap GHG yang berkembang, sebagaimana diusulkan oleh H.R. 2454 di A.S. Proses MOU telah menyediakan lembaga kliring yang penting untuk berbagai pendekatan yang berbeda terhadap perencanaan REDD di antara negara-negara bagian/provinsi-provinsi GCF yang berbeda (lihat Lampiran 2). Berdasarkan pendekatan yang ada, GCF akan berusaha mengembangkan menu yang berisi praktik-praktik terbaik untuk perencanaan REDD yang dapat digunakan oleh negara-negara dan provinsi-provinsi yang merupakan pihak dalam MOU dan yang sesuai dengan upaya-upaya perencanaan REDD di tingkat nasional yang lebih luas. GCF juga akan meninjau lembaga-lembaga dan program regional, seperti Dana Amazon, sebagai model kerjasama antar berbagai negara yang mungkin digunakan dalam perencanaan REDD.
 - b. Penjajakan dan Distribusi Pemasukan Karbon: Negara-negara bagian dan provinsi-provinsi GCF berkomitmen untuk mengembangkan mekanisme yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel untuk penjajakan dan distribusi pemasukan kompensasi REDD di dalam dan di antara yurisdiksi yang bersangkutan dan terhadap para pelaku di tingkat dasar. GCF akan mempertimbangkan rentang model yang mungkin tersedia untuk memastikan penjajakan dan distribusi pemasukan yang tepat, termasuk lembaga-lembaga regional yang ada, seperti Dana Amazon (lihat Lampiran 5: Model Kerangka Kerja untuk Koordinasi REDD).
 - c. **Kerangka Kerja Keikutsertaan di Tingkat Lokal dan Pembagian Manfaat**: REDD akan tersingkir apabila tidak memberikan manfaat bagi masyarakat yang bergantung pada hutan. Negara-negara bagian dan provinsi-provinsi GCF berkomitmen terhadap pandangan bahwa semua kegiatan REDD harus didasari oleh keikutsertaan aktif oleh masyarakat setempat dan bahwa pembayaran untuk kegiatan REDD harus terlebih dahulu dan utamanya dilakukan kepada masyarakat tersebut. Berdasarkan pekerjaan penting yang telah berlangsung di negara bagian Amazonas, Acre, dan Mato Grosso di Brazil dan provinsi Aceh dan Papua di Indonesia (lihat Lampiran 2) dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan REDD yang memastikan keikutsertaan di tingkat lokal dan pembagian manfaat, GCF akan menyuling pelajaran-pelajaran penting dan praktik-praktik terbaik dari kegiatan-kegiatan tersebut dan mengembangkan model kerangka kerja untuk keterlibatan masyarakat dan pembagian manfaat dalam kegiatan-kegiatan REDD. Upaya-upaya tersebut akan dikoordinasikan dengan baik dengan upaya-upaya untuk mengembangkan standar-standar dan kriteria tingkat proyek untuk aset-aset yang memenuhi tingkat kepatuhan terhadap REDD (lihat di atas).

C. Penilaian Kebutuhan

Tugas pelaksanaan terakhir bagi GCF selama tahun 2009-2010 adalah penilaian kebutuhan. Pembahasan yang ekstensif di antara negara-negara bagian dan provinsi-provinsi GCF hingga saat ini, bersama dengan upaya-upaya untuk membuat daftar inventori tentang kegiatan-kegiatan REDD yang berkelanjutan di masing-masing negara bagian dan provinsi GCF, telah memberikan penjelasan bahwa terdapat kebutuhan yang bersifat teknis, kebutuhan di bidang hukum, dan kebutuhan kelembagaan di berbagai negara bagian dan provinsi GCF yang harus dipenuhi untuk bergerak menuju kegiatan-kegiatan yang memenuhi tingkat kepatuhan terhadap REDD. Dukungan teknis terhadap akunting dan pemantauan karbon hutan merupakan suatu contoh, mengingat secara umum kurangnya keterampilan yang terkait dan terbatasnya alokasi anggaran. Bidang lain yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut adalah kepemilikan hutan, hak guna lahan, dan hak karbon, yang mungkin melibatkan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Verifikasi dan keberlakuan juga merupakan bidang penting yang membutuhkan perhatian khusus dalam upaya mengembangkan kegiatan-kegiatan yang memenuhi tingkat kepatuhan terhadap REDD. GCF dan Kelompok Kerja Penilaian Kebutuhan yang diketuai bersama-sama oleh LeRoy Hollenback (Aceh) dan Luis Meneses (Acre) dengan (para) konsultan yang akan ditentukan, berkomitmen untuk melaksanakan penilaian kebutuhan untuk masing-masing negara bagian dan provinsi GCF, mungkin sebagai bagian dari perencanaan REDD, dan untuk mengembangkan strategi untuk menjamin dukungan keuangan dan bantuan teknis untuk memenuhi kebutuhan tersebut¹⁸. Sebagaimana dinyatakan di atas, Kelompok Kerja Penilaian Kebutuhan akan dibagi menjadi gugus-gugus tugas yang terpisah untuk masing-masing negara dan provinsi yang merupakan pihak dalam MOU guna memfasilitasi proses tersebut.

VI. Kesimpulan

Upaya-upaya untuk menstabilkan susunan atmosfer di tingkat yang bijaksana tidak akan berhasil tanpa REDD, sebuah fakta yang makin nyata dalam pembahasan menyangkut kebijakan iklim di berbagai tingkat. Selain itu mengingat ancaman yang terus ada yang dihadapi oleh hutan tropis, peluang untuk mencapai penurunan emisi yang signifikan dari kegiatan-kegiatan REDD tidak akan berlangsung lama. Oleh karena itu, upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan mewakili peluang historis untuk menggerakkan pembahasan tentang kebijakan REDD saat ini ke tahap “pembuktian konsep” melalui pengembangan aturan untuk kegiatan-kegiatan yang memenuhi tingkat kepatuhan terhadap REDD. Negara-negara bagian dan provinsi-provinsi GCF menyadari banyaknya tantangan yang terlibat dalam upaya tersebut dan berkomitmen untuk bekerja sama untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan. Oleh karena itu, Rencana Aksi Bersama ini memaparkan secara garis besar serangkaian kegiatan yang ambisius untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan MOU di sektor kehutanan di tahun 2009 dan 2010, dengan tujuan utama untuk mengembangkan kerangka kerja dan mekanisme yang dapat diterapkan untuk menciptakan aset-aset yang memenuhi tingkat kepatuhan dari kegiatan REDD dan kegiatan karbon hutan lain di Brazil dan Indonesia dan memasukkan aset-aset tersebut ke dalam rejim kepatuhan yang ada dan berkembang di Amerika Serikat dan negara lainnya. Rencana Aksi Bersama tersebut dimaksudkan untuk berfungsi sebagai dokumen hidup yang akan diubah dan disempurnakan sebagaimana diperlukan untuk mencerminkan kegiatan-kegiatan negara-negara bagian dan provinsi-provinsi GCF di masa mendatang seiring dengan terjalannya kerjasama antara mereka untuk menjadikan REDD sebagai bagian dari upaya penanggulangan iklim yang berarti.

18 Kelompok Kerja Penilaian Kebutuhan juga termasuk para perwakilan dari masing-masing anggota GCF yang lain (Amapa, Amazonas, California, Illinois, Mato Grosso, Papua, Para, Wisconsin), serta para perwakilan LSM, termasuk *Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia* (IMAIZON), *Instituto Centro da Vida* (ICV), dan *The Nature Conservancy* (TNC).

